

PELITA

9 Srikandi, Janji Berjuang Maksimal di DPRD Karo Periode 2024-2029 Rebulina br Tarigan : Srikandi Dewan Akan Mengemban Tugas Yang Diamanahkan Masyarakat

Anita Manua - KARO.PELITA.WEB.ID

Oct 2, 2024 - 15:17



KARO - Pelantikan 40 anggota DPRD Karo, Selasa (01/10-2024) periode 2024-2029, yang diambil sumpah janji jabatannya. Ada 9 orang kaum perempuan 'Srikandi' yang turut dilantik.

6 orang berstatus incumbent dan 3 orang merupakan wajah baru. Srikandi di DPRD Karo ini didominasi P-DIP sebanyak 3 orang, yaitu Iriani br Tarigan dari Dapil 3 Karo, Lusia br Sukatendel Dapil 4 Karo dan Pujiati br Ginting Dapil 5 Karo.

Disusul Srikandi dari Dapil 4 Karo, Inolia br Ginting Partai Gerindra dan Rina br Sebayang (wajah baru). Selanjutnya, dari Partai Demokrat yakni Leni Puri Chlefes br Surbakti Dapil 5 Karo dan Endamia Carolina br Kaban (wajah baru) dari Dapil 3 Karo.

Begitu juga dengan Re hulina br Tarigan dari Partai Nasdem Dapil 1 Karo dan Vera Rika br Tarigan Dapil 3 Karo dari Partai Golkar (wajah baru), mereka tampak semangat saat diambil sumpah janji jabatannya.



'Srikandi' Re hulina br Tarigan mengatakan akan tetap semangat dan terus dalam memperjuangkan harapan rakyat. Ia juga bersyukur bisa kembali lolos, yang artinya masih diberikan amanah untuk mengemban tupoksi di DPRD Karo.

"Seorang anggota dewan perempuan, harus berwawasan kebangsaan dan cerdas. Sehingga bisa berlari bersama eksekutif untuk memajukan Tanah Karo Simalem dari segala lini," ujarnya didampingi suami tercinta Gembira Ginting.

Selain itu, kata Re hulina lagi, seorang perempuan anggota dewan jangan mau kalah dengan dewan laki-laki. Kemampuan harus setara dengan perempuan, begitu juga harus pintar membaca APBD yang disampaikan kepala daerah.

"Ibu-ibu dewan harus paham menyusun strategi juga, demi amanah dan tugas yang kita emban kembali di DPRD. Kita juga akan memperjuangkan aspirasi perempuan Karo. Pokoknya akan kami usahakan untuk memperjuangkan semua aspirasi masyarakat," pungkasnya.



Namun begitu, aspirasi masyarakat akan dikaji dari beberapa aspek baik itu dari regulasi, sosiologi budaya dan dari segi anggaran dan regulasi yang ada.

"Jadi antara eksekutif dengan legislatif bagaimana nanti komunikasi dan koordinasi meskipun anggaran kondisi terbatas bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

(Anita Theresia Manua)